

# **OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Ebedruani Sae  
NPP.28.1036

*Asdaf Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur  
Program Studi Keuangan Daerah*

Email : ebedsae10@gmail.com

## ***Abstract***

*The final report entitled “Optimization Market Retribution levies management by Income Department Board of Timor Central South Regency”. This study aimed at exploring the way (how) government of Timor Central South optimizing the market retribution income service.*

*The aim of this study was seeing the way government optimizing the market income service to increase the region income, identifying the hinder factors and figuring out the solutions to solve the problems in relation to the optimization of market retribution income.*

*The method used in this study was qualitative descriptive by using data analysis approach. The reason of choosing this method was to describe the phenomena which is happening in the practice place descriptively without replacing the focus in blaming the certain person or even organization, but it was more on finding solutions to solve problems happen especially in relation to the market income service.*

*The result of the study showed that the market retribution service had not done maximally yet in order to increase the region income. There were some factors that become hindrance such as; the low awareness of paying retribution, the lack of facility, inaccuracy of retribution data, weak control of market levies retribution. Therefore, it is hoped that the government and the society have to support the government policy in relation to market retribution income service in order to decrease and give solutions to the problems happen especially in market retribution optimization service.*

***Key Words: Optimization, Levies Control, Market retribution.***

## **ABSTRAK**

Laporan akhir ini berjudul “**Optimalisasi Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan**”. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana cara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana cara pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengetahui faktor yang menjadi penghambat pemungutan retribusi pasar, dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Analisis Data. Alasan mengapa metode dan pendekatan ini dipilih adalah untuk menggambarkan fenomena yang sedang terjadi di lokasi magang secara deskriptif dengan tidak memindahkan focus serta tidak untuk menyudutkan individu atau

organisasi, tetapi untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul khususnya pada retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kesadaran wajib retribusi, minimnya sarana dan prasarana pasar, data wajib retribusi yang belum akurat, dan lemahnya pengawasan pemungutan retribusi pasar. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah maupun masyarakat juga harus ikut mendukung agar dapat mengurangi dan memberikan solusi agar masalah yang terjadi di dalam optimalisasi pelayanan retribusi pasar dapat terselesaikan.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Penertiban Pemungutan, Retribusi Pasar**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keuangan daerah memiliki bobot yang utama dari pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Darise (2009:25) menyatakan bahwa “keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah”.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, maka daerah yang menjadi daerah otonom harus berusaha semaksimal mungkin .

Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak saja mencerminkan arah dan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana tugas dan kewajiban yang diemban Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam konteks Desentralisasi yang didasarkan hasil penerimaan pajak dan retribusi. Dari sekian banyak pajak dan retribusi yang dipungut oleh kabupaten Timor Tengah Selatan, ada yang masih kurang optimal penerimaannya. Dalam hal ini Retribusi Pelayanan Pasar.

### **1.2. Permasalahan**

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Setiap tahunnya, retribusi pelayanan pasar memiliki peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Timor Tengah Selatan, karena setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut

### 1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks optimalisasi maupun konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Isna Maudlotin Hasanah 2003, berjudul Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang (Isna Maudlotin Hasanah 2003) menemukan bahwa Realisasi pemungutan retribusi Pasar Johar Semarang sudah berjalan cukup baik dilihat dari beberapa aspek antara lain adanya petugas pemungut retribusi tetap dan cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pemungutan retribusi, aspek pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi, aspek pemanfaatan hasil retribusi belum optimal dikarenakan keterbatasan dana pemerintah.

Penelitian Yuli Antikasari berjudul Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Youtefa, Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Yuli Antikasari 2014) Setelah melakukan penelitian dengan melakukan kajian kembali terhadap misi dari mandat organisasi, lingkungan eksternal dan internal analisis SWOT terhadap Pasar Youtefa maka isu strategis yang muncul adalah: (1) Rendahnya kemampuan dan keterampilan pegawai Pasar Youtefa dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan penerimaan retribusi pasar yang terefleksi dari rendahnya pendidikan formal dan fungsional pegawai. (2) Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga mempengaruhi kinerja organisasi dan upaya optimalisasi penerimaan retribusi pasar. (3) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepekaan pedagang dan masyarakat terhadap norma/aturan yang berlaku. (4) Kebijakan dan praktek penentuan rencana target penerimaan retribusi pasar yang tidak didasarkan pada potensi yang ada.

Penelitian Kodir Siregar berjudul Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kodir Siregar 2018) Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilakukan oleh penulis pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Penulis dapat menarik beberapa simpulan yang berkaitan dengan Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut. 1) Pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar grosir atau pertokoan pada Pasar Bawah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, di mana Retribusi pasar grosir

atau pertokoan dipungut setiap bulannya dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Retribusi Pasar Bawah Kabupaten Dompu masih kurang optimal, karena belum ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2) Faktor-faktor penghambat peningkatan Retribusi Pasar bawah adalah realisasi Penerimaan Retribusi Pasar belum tercapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan: 1) Piutang yang dilakukan oleh wajib retribusi 2) Wajib retribusi belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi. 3) Belum tertibnya pemungutan. 4) Kurangnya sosialisasi kepada wajib retribusi 5) Lemahnya pengawasan, 6) Kurangnya sarana dan prasarana. 3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam Optimalisasi Retribusi Pasar Bawah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: 1. Meningkatkan kualitas aparat pemungut retribusi pasar 2. Pengadaan fasilitas operasional bagi pemungut retribusi, 3. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi meliputi: (a) Melakukan sosialisasi; (b) Penegakan sanksi; dan (c) Melakukan patroli keliling 4. Penyempurnaan sistem

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi retribusi pasar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan teori dan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Sutedi (2008 : 100) yang menyatakan optimalisasi dilakukan dengan 5 dimensi yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

#### **1.5. Tujuan.**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemungutan retribusi pasar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor penghambat optimalisasi retribusi pasar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat optimalisasi retribusi pasar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## **II. METODE**

Peneliti akan melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian dekskriptif serta menggunakan pendekatan induktif dengan dasar pertimbangan penelitian yang tidak mengadakan proses perhitungan serta dan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Penulis menarik kesimpulan bahwa observasi tersebut melibatkan peneliti terjun langsung dalam kegiatan sehari-hari sumber data yang akan diteliti untuk mencari data dan mengamati prosedur kegiatannya. Peneliti juga ikut membantu apa yang dikerjakan oleh sumber data agar dapat mengontrol data yang di berikan sehingga tidak terjadi kesalahan pemberian data. Dengan adanya observasi ini maka data yang didapatkan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dimana selain menyiapkan sebuah pertanyaan penulis juga membuka pandangan penulis mengamati pokok persoalan yang diamati. dengan jenis wawancara ini penulis dapat menyiapkan pertanyaan magang saat berada dilapangan agar pertanyaan yang diajukan oleh penulis dapat lebih akurat dan terukur. Akan tetapi wawancara akan lebih berkembang apabila informan belum menyentuh pokok jawaban yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

## **III. KAJIAN TEORETIS DAN LEGALISTIK**

### **3.1 Kajian Teoristik**

#### **Optimalisasi**

Optimalisasi ialah sesuatu proses, metode, perbuatan yang sangat baik buat menggapai hasil yang paling tinggi ataupun maksimal. Menurut Sutedi (2008 : 100) : “Optimalisasi yaitu dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang, adapun upaya yang diperlukan antara lain :

- Memperluas basis penerimaan
- Memperkuat proses pemungutan
- Meningkatkan pengawasan
- Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

- Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik”

### **Retribusi**

Retribusi daerah termasuk dalam salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berguna bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan daerahnya.

### **Pasar**

Menurut Solihin (2009 : 74) pengertian pasar yaitu: “Lembaga ekonomi dimana pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda.

## **3.2 Kajian Legalistik**

Setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan pasti dilandasi oleh produk hukum yang mengatur kegiatan tersebut, agar terjadi keserasian dan keteraturan sehingga program dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat beberapa dasar hukum, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 89 Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah .
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
- Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Retribusi Pasar merupakan salah satu sub sektor penerimaan daerah yang perlu untuk dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Banyak objek pajak yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan tetapi masih banyak juga yang masih belum memiliki NPWP daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi. Namun dalam proses pengidentifikasian wajib pajak hampir sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

*Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017-2020*

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase (%)</b>
2017	778.990.000	780.879.000	100,24
2018	970.800.000	923.251.000	95,10
2019	795.834.400	1.037.333.741	130,34
2020	979.934.400	678.497.282	69,23

#### **4.1 Hambatan Yang dihadapi**

- a. Minimnya Sarana dan Prasarana Pasar, Kebersihan dan Keamanan Pasar.

Untuk melaksanakan fungsi pelayanan di pasar, diperlukan sarana dan prasarana yang ada di pasar misalnya kondisi bangunan pasar serta segala kelengkapan pasar.

- b. Data wajib retribusi yang belum akurat

Pendataan ini berupa pendataan jumlah objek retribusi pedagang dan sarana yang ada di masing - masing pasar. Kesulitan pendataan dan pemungutan ini timbul karena pedagang golongan tersebut umumnya berdagang mulai dini hari sampai pukul enam pagi dan sebagian hanya menjual pada sore hari.

- c. Lemahnya pengawasan dari pihak Badan Pendapatan Daerah

Lemahnya pengawasan membuka peluang terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh akibat lemahnya pengawasan adalah rendahnya disiplin kerja pemungut retribusi atau juru salar.

#### **4.2 Upaya Mengatasi Hambatan**

Menghadapi kendala-kendala dalam pemungutan retribusi pasar Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus melakukan usaha untuk perbaikan kedepannya. Upaya - upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar antara lain meningkatkan kualitas aparat kantor di Badan Pendapatan Daerah, dengan meningkatkan kualitas aparat dapat diharapkan menjadi faktor penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan peningkatan penerimaan retribusi pasar.

### **4.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks optimalisasi maupun konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Isna Maudlotin Hasanah 2003, berjudul Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang (Isna Maudlotin Hasanah 2003) menemukan bahwa Realisasi pemungutan retribusi Pasar Johar Semarang sudah berjalan cukup baik dilihat dari beberapa aspek antara lain adanya petugas pemungut retribusi tetap dan cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pemungutan retribusi, aspek pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi, aspek pemanfaatan hasil retribusi belum optimal dikarenakan keterbatasan dana pemerintah.

Penelitian Yuli Antikasari berjudul Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Youtefa, Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Yuli Antikasari 2014) Setelah melakukan penelitian dengan melakukan kajian kembali terhadap misi dari mandat organisasi, lingkungan eksternal dan internal analisis SWOT terhadap Pasar Youtefa maka isu strategis yang muncul adalah: (1) Rendahnya kemampuan dan keterampilan pegawai Pasar Youtefa dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan penerimaan retribusi pasar yang terefleksi dari rendahnya pendidikan formal dan fungsional pegawai. (2) Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga mempengaruhi kinerja organisasi dan upaya optimalisasi penerimaan retribusi pasar. (3) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepekaan pedagang dan masyarakat terhadap norma/aturan yang berlaku. (4) Kebijakan dan praktek penentuan rencana target penerimaan retribusi pasar yang tidak didasarkan pada potensi yang ada.

Penelitian Kodir Siregar berjudul Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kodir Siregar 2018) Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilakukan oleh penulis pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Penulis dapat menarik beberapa simpulan yang berkaitan dengan Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut. 1) Pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar grosir atau pertokoan pada Pasar Bawah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, di mana Retribusi pasar grosir atau pertokoan dipungut setiap

bulannya dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Retribusi Pasar Bawah Kabupaten Dompu masih kurang optimal, karena belum ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2) Faktor-faktor penghambat peningkatan Retribusi Pasar bawah adalah realisasi Penerimaan Retribusi Pasar belum tercapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan: 1) Piutang yang dilakukan oleh wajib retribusi 2) Wajib retribusi belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi. 3) Belum tertibnya pemungutan. 4) Kurangnya sosialisasi kepada wajib retribusi 5) Lemahnya pengawasan, 6) Kurangnya sarana dan prasarana. 3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam Optimalisasi Retribusi Pasar Bawah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: 1. Meningkatkan kualitas aparat pemungut retribusi pasar 2. Pengadaan fasilitas operasional bagi pemungut retribusi, 3. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi meliputi: (a) Melakukan sosialisasi; (b) Penegakan sanksi; dan (c) Melakukan patroli keliling 4. Penyempurnaan sistem pengawasan.

## **V. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terapan ilmu pemerintahan selama dilapangan serta sesuai dengan rumusan masalah maupun tujuan masalah sebagaimana diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai optimalisasi pengelolaan pemungutan retribusi pasar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai berikut:

1. Apabila kita lihat dari potensi yang ada serta realisasi yang telah tercapai, retribusi pasar merupakan retribusi daerah yang harus dikembangkan. Hal tersebut memberikan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan .
2. Dalam pelaksanaannya optimalisasi pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih terdapat dihadapkan pada beberapa faktor penghambat, antara lain:
  - a. Minimnya sarana dan prasarana pasar, kebersihan, dan keamanan pasar.
  - b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai akan mengakibatkan tidak terciptanya pasar yang bersih dan sehat.

- c. Belum maksimalnya pendataan wajib retribusi karena tidak teridentifikasinya sebagian pedagang.
  - d. Lemahnya pengawasan aparat Badan Pendapatan Daerah.
  - e. Kurangnya kesadaran retribusi wajib sehingga tidak merepotkan juru pungut dalam memungut retribusi.
3. Adapun upaya - upaya dalam mengoptimalkan retribusi pasar yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah, antara lain:
- a. Meningkatkan kualitas SDM / Aparat dengan peningkatan disiplin, pemberian motivasi kerja, dan menambah jumlah pegawai yang terjun ke lapangan.
  - b. Perbaiki sarana dan prasarana fasilitas kerja
  - c. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pembayaran retribusi pasar melalui pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi pasar dan mengadakan evaluasi kerja secara.

**Keterbatasan Penelitian** Penulis mempersempit ruang lingkup permasalahan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya maka penulis membatasi masalah pada **“OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”**.

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Seluruh ASN di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah memberikan kontribusi data informasi, saran, dan bimbingan kepada penulis

## **VII. Daftar Pustaka**

- Azwar, S. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, W. John. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat - Daerah*. Bogor: Ghalia  
Indonesia

Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Rafika Aditama

Kencana, syafei Inu. 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju

Kosasih, A. 2006. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Grasindo

Kusnardi, Moh. 1995. *Ilmu Negara*. Bandung: Gaya Media Pratama

Liang, Gie. 1994. *Pertumbuhan Pemetintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*.  
Jakarta: Gunung Agung

Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offest

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offest

Moleong, Lexi J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya

Nasir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Gralia Indonesia

Samudra, Azhari A. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Satori, Djam'an. & Komariah, Aan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:  
ALFABETH

Siahaan, Marihot.P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi*

*Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers

Siahaan, Pahala Marihot. 2013. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Aes Gunarsa. Bandung: PT. Rafika  
Aditama

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung:  
ALFABETA

Solihin, Ismail. 2009. Pengantar Managemen. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: CV.ALFABETA

Sunarto. 2005. *Pajak dan Reribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Yogyakarta

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Daerah Kabupate Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang  
Retribusi Jasa Umum

<https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/tugas-pokok-dispenda/>

<https://timortengahselatankab.bps.go.id/subject/2/komunikasi.html>